

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2001-2012

(The Analysis of Regional Financial Performance of Probolinggo Regency in the 2001-2012)

Bayu Prawoto, Aisah Jumiati, Edy Santoso
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: prawoto_bayu@yahoo.com

Abstrak

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah dan menganalisis strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo. Sumber data yang digunakan diantaranya adalah data primer berdasarkan hasil kuisioner dan data sekunder meliputi data PAD, data APBD Kabupaten Probolinggo, dan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis kuantitatif rasio keuangan, analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil dari hasil analisis rasio keuangan dengan menggunakan 4 metode menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan rasio kemandiriannya, rata-rata rasio sebesar 26,56% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah sudah baik, dimana pola kemandirian daerahnya berada pada pola kemandirian yang konsultif. Hasil dari perhitungan rasio desentralisasi fiskal, rata-rata rasio sebesar 5,46% yang menunjukkan bahwa kemampuan kinerja keuangan daerah masih sangat kurang. Hasil dari perhitungan rasio efektifitas, rata-rata rasio sebesar 114,92% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berjalan efektif. Hasil perhitungan rasio belanja pembangunan terhadap APBD menunjukkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun kinerja keuangan mengalami penurunan karena terlalu banyaknya pengeluaran untuk belanja, belanja terbanyak digunakan untuk belanja pembangunan. Selanjutnya hasil dari analisis deskriptif dan SWOT yaitu prioritas strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD khususnya di Kabupaten Probolinggo yaitu adalah strategi memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada (WO). Adapun strategi yang dapat digunakan diantaranya yaitu: mengoptimalkan kekayaan dan keanekaragaman SDA yang ada menjadi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga menjadi daerah yang mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan dana pembangunan daerahnya dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan memilih yang berkualitas dan jujur guna meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Otonomi Daerah, PAD, Rasio Keuangan

Abstract

This observation in the thesis aims to determine the extent to where a local government's financial performance and analyze the strategy of increasing revenue in the Regency Probolinggo. Data used include primary data obtained through the result quisioner and secondary data, such as data local revenue, budget data Probolinggo Regency, and RPJMD Probolinggo Regency. The method used in the study is a quantitative analysis of financial ratios, SWOT analysis and descriptive anlysis. Results from the analysis of financial ratios using 4 methods showed that the ratio of its independence from the calculation, the average ratio of 26.56%, which indicates that the area has good financial performance, where patterns are the patterns of regional independence independence konsultif. The results of the calculation of the ratio of fiscal decentralization, the average ratio of 5.46% which suggests that the ability of the region's financial performance is still lacking. The results of the calculation of the effectiveness ratio, the average ratio of 114.92% which indicates that the region's financial performance has been effective. The results of the calculation of the ratio of development expenditure to the budget shows that during the 12 years of financial performance decreased due to too much spending on shopping, spending most used for development expenditure. The results of the SWOT analysis is descriptive and priority strategies that can be used to increase revenue, especially in Probolinggo which is a strategy utilizing existing opportunities by minimizing weaknesses (WO). The strategies that can be used such as: optimizing the richness and diversity of existing resources into local revenue sources to reduce dependence on central pemerintah to become an independent area that can meet the needs of local development funds and utilize the existing workforce and selecting qualified and honest in order to improve performance so as to improve the reception area in particular PAD. The main focus should be implemented and carried out by local governments, namely Probolinggo minimize internal problems to be able to seize better opportunities to improve PAD (Turn around).

Keywords: *Autonomy, Financial Performance, Financial Ratios, PAD*

Pendahuluan

Pembangunan adalah salah satu cara, langkah, atau proses untuk menuju suatu perubahan melalui suatu upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja dimana nantinya upaya tersebut menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Destrika (2006:1) berkembang apa tidaknya pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh pendapatan daerah dimana pendapat itu digunakan untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya. Pembangunan daerah merupakan sebagian kecil dari lingkup pembangunan nasional yang nantinya diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah, dan melakukan percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal dan terpencil. Nantinya pembangunan daerah tersebut dilakukan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah tersebut (Ginandjar, 2012:147).

Langkah pembangunan membawa begitu banyak perubahan dalam segi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini salah satunya yaitu dari segi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau yang lebih dikenal dengan "Otonomi Daerah". Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah otonom untuk mengatur dan menata kepentingan masyarakat dan daerahnya atas ide sendiri dengan berdasarkan dukungan dan aspirasi masyarakatnya (Soekarwo, 2003:41). Bisa dikatakan juga otonomi daerah yaitu upaya suatu daerah untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian, 2006:2). Hal ini didukung dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Wenny, 2012:40). Diberlakukannya kedua Undang-Undang ini mengakibatkan perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan. Maksudnya disini, daerah otonom tersebut harus mampu dan memiliki wewenang untuk menggali sumber keuangannya dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat seminimal mungkin (Rukmana, 2013:2).

Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2004, PAD disini merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga daerah otonom berhak mengatur dan membiayai daerahnya sendiri. PAD nantinya diharapkan dapat menjadi opsi utama dalam membiayai rencana kegiatan-kegiatan dan kebutuhan daerah. Sebab semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD itu menunjukkan semakin tinggi kualitas otonominya yang dimana itu menunjukkan semakin mandiri daerah itu (Destrika, 2006:2). Hal ini berarti menandakan bahwa PAD menjadi tolak ukur bagi daerah dalam mewujudkan otonomi daerah harus benar-benar ditingkatkan.

Sumber keuangan yang berasal dari PAD harus benar-benar diprioritaskan dari pada sumber keuangan yang berasal dari luar PAD. Hal ini disebabkan sumber keuangan yang berasal dari PAD dapat digunakan sesuai kehendak dan kebutuhan pemerintah untuk pembiayaan serta kepentingan daerah demi kepentingan bersama (Rukmana, 2013:2). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi

seberapa besar kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dan menganalisis strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2001-2012.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pemberian kuisioner tentang strategi peningkatan PAD kepada narasumber yang terdiri instansi terkait (DISPENDA, Dinas Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo) dan beberapa pakar Akademisi (Dosen). Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Data sekunder yang diperlukan berbentuk data kurun waktu (time series) tahunan untuk tahun 2001-2012 dari variabel-variabel yang digunakan. Data-data yang dimaksud meliputi data PAD, data APBD Kabupaten Probolinggo, dan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Sumber data penelitian ini diperoleh dari BPS Kabupaten Probolinggo, BPS Provinsi Jawa Timur, dan literatur lainnya.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan pada suatu data yang dianalisis secara teoritis maupun fakta empiris dari sampel yang ada dan koefisien korelasi antar variabelnya. Metode ini didasarkan pada analisis pada variabel-variabel yang mendukung penelitian ini, dimana tidak dapat diukur secara nyata melainkan dengan cara menguraikan atau menjelaskan dalam bentuk kalimat (naratif). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sehingga analisisnya dapat dilakukan dengan melihat indeks perkembangannya baik dari segi besaran maupun prosentasenya (Destrika, 2006:36).

Analisis Rasio Keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengidentifikasi kinerja keuangan suatu daerah. Caranya yaitu dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan. Beberapa alat analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu: rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio belanja terhadap APBD (Halim dalam Kaho, 2012:290). Analisis ini nantinya digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pertama mengenai seberapa besar kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu tahun 2001-2012.

a. Rasio Kemandirian. Alat analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan daerahnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah yang

utama, dibandingkan dengan sumber pendapatan lain.

$$\text{Kinerja Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi}}$$

Tabel 3.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Kaho, 2012: 292

Jika hasil rasionya semakin tinggi, maka ini menunjukkan bahwa upaya dan kinerja pemerintah daerah semakin baik karena hal itu menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan kinerja suatu daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Kaho, 2012:291).

b. Rasio Desentralisasi Fiskal. Analisis ini merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target PAD. Melalui analisis rasio desentralisasi fiskal ini juga nantinya akan diketahui seberapa besar kinerja keuangan suatu daerah tersebut (Wenny, 2012:43). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali pendapatan yaitu:

$$\text{Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Tabel 3.2 Indikator Rasio Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Keuangan	RDF (%)
Sangat Kurang	0-30
Kurang	30-70
Baik	70-100

Sumber: Efendi dan Sri Wuryanti, 2011

Jika hasil rasionya semakin tinggi, maka ini menunjukkan bahwa upaya dan kinerja pemerintah daerah semakin baik karena adanya perencanaan dan pengelolaan yang matang, khususnya dalam hal keuangan daerah (Bastian dalam Batubara dalam Wenny, 2012:43).

c. Rasio Efektivitas. Melalui analisis rasio efektivitas nantinya akan diketahui seberapa besar kinerja keuangan suatu daerah tersebut. Selain itu, dengan rasio efektivitas dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target PAD (Kaho, 2012:292). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas ini ditunjukkan dengan angka minimal yaitu 1 atau 100%. Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu:

$$\text{Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD yang Ditetapkan}}$$

Tabel 3.3 Efektifitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Tidak efektif	X < 100%
Efektif Berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

Sumber: Moh. Mahsun dalam Puspitasari, tanpa tahun

Jika hasil rasionya semakin tinggi, maka ini menunjukkan bahwa upaya dan kinerja pemerintah daerah semakin baik karena adanya perencanaan dan pengelolaan yang matang, khususnya dalam hal keuangan daerah (Bastian dalam Batubara dalam Wenny, 2012:43).

d. Rasio Belanja Terhadap APBD. Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Kaho, 2012:293). Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti presentasi belanja investasi (pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi ekonomi masyarakat akan cenderung turun, begitu juga sebaliknya. Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu:

$$\text{Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

Tabel 3.4 Indikator Prioritas Keuangan Daerah

Kriteria	Prioritas
Belanja Pembangunan > 50%	Belanja Pembangunan
Belanja Rutin > 50%	Belanja Rutin

Sumber: Efendi dan Sri Wuryanti, 2011

Jika hasil rasionya semakin tinggi, maka ini menandakan bahwa bahwa alokasi anggaran untuk belanja pembangunan mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan rutin, begitu juga sebaliknya.

Analisis SWOT. Alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan suatu strategi guna menghadapi ancaman dan tantangan. Analisis ini nantinya digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah kedua mengenai bagaimana strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo. Caranya yaitu dengan memaksimalkan faktor *strenght* dan *opportunity*, secara bersamaan juga dengan meminimalkan faktor *weakness* dan *threats* (Rangkuti, 1998:19).

Selanjutnya, alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas interaksi *Internal Strategic Factor Anlysis Summary* (IFAS) dan *External Strategic Factor Anlysis Summary* (EFAS). IFAS adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal dalam kerangka kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Melalui metode ini dapat diketahui dan mengevaluasi terutama dalam hal strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo melalui sistem pembobotan. Setelah dilakukan pembobotan maka nantinya akan

diketahui prioritas strategi yang harus dilakukan terlebih dahulu. EFAS digunakan untuk menganalisis faktor eksternal dalam kerangka peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Melalui metode ini dapat diketahui dan mengevaluasi terutama dalam hal strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo melalui sistem pembobotan. Setelah dilakukan pembobotan maka nantinya akan diketahui prioritas strategi yang harus dilakukan terlebih dahulu.. Interaksi bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimilikinya.

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Rasio Keuangan. Melalui analisis ini nantinya akan diketahui apakah perkembangan kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan, penurunan atau stagnan. Caranya yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dalam satu periode anggaran APBD dengan satu periode anggaran APBD tahun sebelumnya. Berikut hasil analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan metode rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio belanja terhadap APBD.

a. Hasil Analisis Rasio Kemandirian Daerah. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis rasio kemandirian yang diambil dari laporan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2001-2012 diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.1 dibawah.

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2001-2012

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Pertumbuhan Rasio Kemandirian (%)	Indikator
2001	118,15%	-	
2002	136,85%	15,83%	
2003	71,97%	-47,41%	
2004	108,82%	51,21%	
2005	128,83%	18,39%	
2006	121,39%	-5,78%	
2007	147,74%	21,71%	
2008	149,61%	1,27%	
2009	65,61%	-56,15%	
2010	112,40%	71,32%	
2011	79,10%	-29,63%	
2012	-	-	
	Rat-rata	26,56%	Konsultif

Sumber: Lampiran C, data diolah

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.1 diketahui bahwa pertumbuhan rasio kemandirian Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan rasio kemandirian Kabupaten Probolinggo turun sebesar 56,15% sehingga pertumbuhan rasionya sebesar 65,61%. Penurunan tersebut salah satunya dapat diakibatkan karena pada tahun tersebut dalam membiayai keperluan daerahnya lebih banyak menggunakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat

dibandingkan dari hasil PAD daerahnya. Hal itu terjadi karena PAD pada tahun 2009 tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran daerah pada tahun itu. Akan tetapi pada tahun berikut 2010 mengalami peningkatan sebesar 71,32%. Akibat penurunan pada tahun 2009 sebelumnya, akhirnya pemerintah Kabupaten Probolinggo berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan rasio kemandirian di tahun berikutnya. Salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan sumber penerimaan asli daerah yaitu PAD dan terbuti pada tahun 2010 pertumbuhan rasio kemandiriannya mengalami peningkatan sebesar 112,40%. Pada tahun 2011 pertumbuhan rasio kemandirian kembali mengalami penurunan namun tidak terlalu banyak, yaitu hanya sebesar 29,63% sehingga rasio kemandirian sebesar 79,10%.

Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertumbuhan rasio kemandirian Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 12 tahun dimulai pada tahun 2001-2012 rata-rata berada pada kisaran 26,56%. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemandirian Kabupaten Probolinggo berada pada pola kemandirian yang konsultif (Lihat pada Tabel 3.1). Maksudnya dari pola konsultif yaitu dimana intervensi pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah sedikit demi sedikit telah mampu melaksanakan otonomi daerah (Halim dalam Kaho, 2012:292).

b. Hasil Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis rasio desentralisasi fiskal yang diambil dari laporan PAD dan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2001-2012 diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.2 dibawah.

Tabel 4.2 Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Probolinggo Tahun 2001-2012

Tahun	Total PAD	Total Penerimaan Daerah	RDF (%)	Indikator
2001	8.701.810.359	274.274.978.009	3,18%	Sangat Kurang
2002	14.832.203.734	330.115.928.477	4,50%	Sangat Kurang
2003	23.705.403.724	396.721.642.926	5,98%	Sangat Kurang
2004	19.162.750.436	347.004.328.154	5,53%	Sangat Kurang
2005	22.565.255.032	377.825.671.482	5,98%	Sangat Kurang
2006	32.188.565.275	565.300.010.445	5,70%	Sangat Kurang
2007	35.400.730.318	656.039.077.424	5,40%	Sangat Kurang
2008	39.88.499.148	717.089.299.869	5,54%	Sangat Kurang
2009	42.548.002.266	733.841.794.963	5,80%	Sangat Kurang
2010	46.024.665.849	903.709.481.862	5,10%	Sangat Kurang
2011	75.654.859.912	1.135.279.347.237	6,67%	Sangat Kurang
2012	90.009.457.309	1.261.844.169.685	7,14%	Sangat Kurang

Sumber: Lampiran D, data diolah

Hasil analisis pada Tabel 4.2 diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Meskipun pada tahun-tahun tertentu juga mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak terlalu drastis hanya sekitar 0,50% dan tidak mencapai 1%. Pada tahun 2012 rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Probolinggo mencapai rasio tertinggi dari tahun-tahun yang sebelumnya yaitu sebesar 7,14%. Namun secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 12 tahun mulai

tahun 2001-2012 yaitu hanya sebesar 5,46%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2001-2012 masih sangat kurang dilihat dari hasil perhitungan (Lihat pada Tabel 3.2).

c. Hasil Analisis Efektifitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis efektifitas yang diambil dari laporan PAD Kabupaten Probolinggo tahun 2001-2012 diperoleh hasil: seperti pada Tabel 4.3 dibawah.

Tabel 4.3 Rasio Efektifitas Kabupaten Probolinggo Tahun 2001-2012

Tahun	Rasio Efektifitas (%)	Pertumbuhan Rasio Efektifitas (%)	Indikator
2001	111,40%	-	Efektif
2002	121,44%	9,02%	Efektif
2003	111,88%	-7,88%	Efektif
2004	90,61%	-19,02%	Efektif
2005	116,55%	28,63%	Efektif
2006	144,84%	24,28%	Efektif
2007	122,05%	-15,74%	Efektif
2008	117,79%	45,67%	Efektif
2009	106,56%	-9,53%	Efektif
2010	109,83%	3,07%	Efektif
2011	109,61%	-0,2%	Efektif
2012	116,47%	6,26%	Efektif

Sumber: Lampiran E, data diolah

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3 diketahui bahwa rasio efektifitas Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2010 rasio efektifitas Kabupaten Probolinggo sebesar 109,83%. Pada pada tahun berikut yaitu 2011 mengalami penurunan sebesar 0,2% sehingga rasio efektifitasnya menjadi sebesar 109,61%. Akibat penurunan tersebut pemerintah Kabupaten Probolinggo berusaha untuk meningkatkan laju efisiensi rasio di tahun berikutnya. Salah satu cara diantaranya yaitu dengan mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah dibanding dengan anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi disini, realisasi PAD nantinya harus lebih besar dari anggaran PAD yang direncanakan sebelumnya. Hal itu benar terbukti, dimana pada tahun 2012 rasio efektifitas mengalami peningkatan kembali sebesar 6,26% sehingga rasio efektifitasnya menjadi 116,47%. Rata-rata rasio efektifitas yang diperoleh Kabupaten Probolinggo selama tahun 2001-2012 sebesar 114,92%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka rasio efektifitas keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 12 tahun telah berjalan efektif (Lihat pada Tabel 3.3). Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berhasil mengefektifkan realisasi PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan melebihi dari target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Moh. Mahsun dalam Puspitasari, tanpa tahun).

d. Hasil Analisis Rasio Belanja terhadap APBD. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis rasio belanja terhadap APBD yang diambil dari

laporan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2001-2012 diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.4 dibawah.

Tabel 4.4 Rasio Belanja terhadap APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2001-2012

Tahun	Belanja Pembangunan	Total Belanja APBD	Rasio Belanja Pembangunan (%)	Perkembangan (%)
2001	82.867.615.207	254.464.325.473	32,57%	-
2002	103.296.339.526	297.452.731.321	34,73%	24,66%
2003	138.771.609.407	369.393.266.741	37,57%	34,35%
2004	271.485.166.912	348.729.612.214	77,85%	48,89%
2005	419.105.495.727	4.935.219.935.510	8,50%	-54,38%
2006	690.590.662.639	508.665.573.137	35,77%	64,78%
2007	151.258.397.553	661.448.599.417	22,87%	-78,10%
2008	148.397.069.713	657.838.608.333	22,56%	-1,90%
2009	164.940.475.505	721.436.150.511	22,87%	11,15%
2010	100.021.193.247	861.394.887.451	11,62%	-39,36%
2011	225.588.664.789	1.112.602.221.083	20,28%	125,55%
2012	260.067.973.455	1.290.406.987.331	20,16	-15,29%

Sumber: Lampiran F, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, menunjukkan hasil bahwa rasio belanja pembangunan Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 12 tahun mulai tahun 2001-2012 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2001-2004 rasio belanja pembangunan terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2009 rasio belanja pembangunan mencapai 22,87%. Namun hal ini tidak berlanjut ditahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010 rasio belanja pembangunan mengalami penurunan sebesar 39,36% sehingga rasio belanja pembangunannya menjadi 11,62%. Menurunnya nilai rasio belanja pembangunan ini salah satunya diakibatkan karena kurang jeli nya pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam memprioritaskan alokasi dana yang seharusnya diutamakan pada tahun itu, sehingga berakibat pada merosotnya kinerja keuangan daerah pada tahun 2010. Berkaca dari menurunnya rasio belanja pembangunan pada tahun sebelumnya, akhirnya pada tahun 2011 rasio belanja pembangunan mengalami peningkatan kembali sebesar 125,55% sehingga menjadi 20,28%.

Melihat dari hasil perhitungan pada Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa porsi belanja pembangunan di Kabupaten Probolinggo relative besar. Artinya alokasi anggaran untuk belanja pembangunan mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan rutin (Lihat pada Tabel 3.4). Dilihat angka rasio belanja pembangunan dari tahun ketahunnya menunjukkan hasil yang cukup tinggi yang menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten probolinggo selama kurun waktu 12 tahun mengalami penurunan karena banyaknya pengeluaran dari pada penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo.

Hasil Analisis SWOT

a. Strategi Peningkatan PAD. Analisis SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan suatu strategi guna menghadapi ancaman dan tantangan dengan memaksimalkan faktor strenght dan opportunity, secara

bersamaan juga dengan meminimalkan faktor weakness dan threats (Rangkuti, 1998:19). Dalam penelitian ini analisis SWOT digunakan untuk menganalisis strategi peningkatan PAD khususnya di Kabupaten Probolinggo dengan melihat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi PAD. Khusus dalam penelitian ini faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi PAD diambil berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2008-2013 dan data riil PAD selama 12 tahun yaitu tahun 2001-2012 yang telah terangkum dalam Tabel 4.5 dibawah.

Tabel 4.5 Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman Strategi Peningkatan PAD

Kekuatan (<i>Streight</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Adanya dukungan anggaran yang berbasis kinerja. 2. Sektor retribusi daerah merupakan sektor terbesar dalam kontribusi penerimaan dibanding dengan sektor lainnya dalam PAD. 3. Tersedianya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung.	1. Penerimaan daerah yang masih rendah terutama dari sektor PAD. 2. Sistem pelayanan kepada masyarakat yang masih rendah. 3. Belum adanya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dana pembangunan sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat. 4. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan infrastruktur yang ada.
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Kondisi demografi yang mendukung. 2. Tersedianya tenaga kerja. 3. Kekayaan dan keanekaragaman SDA.	1. Penegakan hukum dan HAM yang belum maksimal 2. Terdapat inkonsistensi kebijakan yang menghambat minat pengusaha dan investor. 3. Eksploitasi SDA

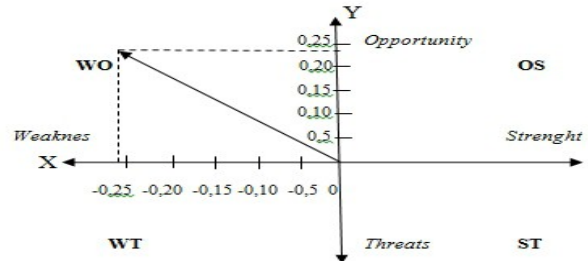
Sumber: Lampiran J, diolah

Setelah mengetahui kondisi eksternal dan internal yang terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2008-2013, langkah selanjutnya yaitu menyusun matrik SWOT. Matrik SWOT merupakan suatu matrik yang dapat menggambarkan berbagai alternative strategi peningkatan PAD yang terdiri dari strategi SO, WO, ST, dan WT.

b. Prioritas Strategi Peningkatan PAD. Setelah analisis SWOT secara kualitatif dilakukan, selanjutnya analisis SWOT tersebut dapat dikembangkan lagi secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh *Pearce* dan *Robinson* (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya dan prioritas strategi yang harus dilakukan. Dalam melakukan analisis SWOT secara kuantitatif ini penulis melakukan pengambilan data dengan cara membuat kuisioner yang kemudian ditujukan kepada instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, dan para Akademisi yang dimana dalam hal ini diwakilkan oleh para Dosen.

Berdasarkan analisis diatas yang diperoleh dari berbagai responden, dapat kita lihat bahwa strategi peningkatan PAD salah satunya dapat kita analisis dengan menggunakan

analisis SWOT yaitu dengan cara memprtimbangkan faktor-faktor *internal* yang terdiri dari kekuatan dan ancaman serta faktor *eksternal* yang terdiri dari peluang ancaman yang terdapat dalam daerah tersebut. Pada daerah Kabupaten Probolinggo sendiri, strategi peningkatan PAD berdasarkan hasil analisis SWOT berada pada kuadran III. Hal ini bisa dilihat dan dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Matrik Grand Strategi Analisis SWOT

Berdasarkan Gambar 4.1 hasil dari gambar Matrik Grand Strategi menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD Kabupaten Probolinggo betada pada kuadran III. Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo menghadapi peluang yang sangat besar dalam meningkatkan PAD, namun dilain pihak, mereka juga menghadapi berbagai kendala atau kelemahan internal. Olehsebab itu melihat kondisi yang seperti itu, prioritas strategi yang tepat untuk diterapkan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo yaitu adalah strategi W-O. Fokus yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yaitu meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik dalam meningkatkan PAD (*Turn around*).

Pembahasan

Dilihat dari hasil analisis rasio keuangan dengan menggunakan empat metode yaitu rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio belanja terhadap APBD dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo dari tiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2001-2012 mengalami fluktuasi. Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan di Kabupaten Probolinggo masih belum stabil karena masih terjadi peningkatan dan penurunan kinerja keuangan. Belum stabilnya kinerja keuangan suatu daerah salah satunya karena kurang bisanya pemerintah daerah dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada didaerah tersebut sebagai sumber penerimaan asli daerah, salah satunya yaitu penerimaan yang berasal dari PAD. Komponen sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Jika dilihat dari pertumbuhan rasio kemandirian Kabupaten Probolinggo selama tahun 2001-2012 mengalami fase naik turun (fluktuatif). Menurunnya pertumbuhan rasio kemandirian pada tahun 2001-2003 menunjukkan bahwa penerimaan PAD lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat/provinsi sehingga mengakibatkan pertumbuhan rasio kemandirian menurun. Dilihat dari trend linearnya juga terlihat jelas bahwa trend linear pertumbuhan rasio

kemandirian Kabupaten Probolinggo selama tahun 2001-2012 mengalami penurunan. Menurunnya nilai rasio kemandirian juga menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan untuk kegiatan daerahnya.

Pada tahun 2004 pertumbuhan rasio kemandirian daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan pertumbuhan rasio kemandirian ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo mulai memperbaiki sektor penerimaan asli daerahnya salah satunya PAD sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan untuk kegiatan daerah sedikit demi sedikit mulai berkurang. Berdasarkan teori kinerja keuangan, semakin meningkatnya rasio kemandirian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai membaik. Hasil perhitungan pertumbuhan rasio kemandirian Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 12 tahun dimulai pada tahun 2001-2012 rata-rata berada pada kisaran 26,56%. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemandirian Kabupaten Probolinggo berada pada pola kemandirian yang konsultif, maksudnya intervensi pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah sedikit demi sedikit telah mampu melaksanakan otonomi daerah (Halim dalam Kaho, 2012:292).

Kondisi kinerja keuangan selanjutnya dilihat dari hasil rasio desentralisasi fiskal. Tiap tahunnya rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Probolinggo pada tahun 2001-2012 rata-rata terus mengalami peningkatan. Hanya pada tahun-tahun tertentu saja rasio desentralisasi fiskal mengalami sedikit penurunan. Dilihat dari trend linear rasio desentralisasi fiskalnya terlihat jelas bahwa selama tahun 2001-2012 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin besarnya angka rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo sedikit demi sedikit membaik. Akan tetapi jika dilihat dari hasil perhitungan yang diperoleh, besar nilai prosentase rasio tersebut masih dalam kategori sangat kurang. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh masih besarnya penerimaan daerah tersebut yang diperoleh dari sumber penerimaan diluar sumber pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Probolinggo, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah, dimana kinerja keuangan dikatakan lemah apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat minim.

Alat analisis selanjutnya yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan suatu daerah adalah alat analisis efektivitas. Kondisi rasio efektifitas Kabupaten Probolinggo dari tahun 2001-2012 terus mengalami fluktuasi dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2004-2006. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo pada tahun itu mengalami peningkatan yang positif. Meningkatnya rasio efektifitas ini tentunya disebabkan karena realisasi PAD yang diperoleh pemerintah daerah melebihi target dari anggaran PAD yang telah ditetapkan sebelumnya (lihat pada Lampiran B). Pada tahun selanjutnya yaitu 2007, rasio efektifitas mengalami

penurunan kembali meskipun tidak begitu besar. Jika dilihat trend linearnya rasio efektifitasnya mengalami peningkatan, namun peningkatannya sangat sedikit sekali. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka rasio efektifitas keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 12 tahun telah berjalan efektif karena lebih dari 100%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori rasio efektifitas, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun sudah cukup baik karena realisasi PAD yang didapat oleh pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan anggaran PAD yang telah direncanakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melampaui target minimal anggaran yang direncanakan sebelumnya, meskipun pada tahun-tahun tertentu masih terjadi penurunan, namun penurunan tersebut tidak begitu besar pengaruhnya sehingga masih bisa untuk ditingkatkan lagi kedepannya.

Alat analisis rasio keuangan terakhir yang digunakan untuk melihat besarnya kinerja keuangan daerah adalah rasio belanja terhadap APBD. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio belanja terhadap APBD selama 12 tahun cukup tinggi yang menandakan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pembangunan mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan rutin. Berdasarkan teori kinerja keuangan, meningkatnya rasio belanja terhadap APBD ini menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan karena banyaknya pengeluaran dari pada penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Hal ini bisa terlihat dari trend linear yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun trend kinerja keuangan mengalami penurunan.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian untuk mengidentifikasi strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo. Alasan perlu dilakukannya strategi peningkatan PAD karena masih ada kaitannya dengan hasil penelitian pertama dimana ternyata kinerja keuangan daerah Kabupaten Probolinggo selama tahun 2001-2012 masih kurang baik dan terdapat beberapa sektor yang belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan kembali. Salah satu sektor yang dapat untuk dikembangkan agar kinerja keuangan daerah kembali baik yaitu PAD.

Berdasarkan hasil dari analisis SWOT telah diperoleh berbagai langkah strategi alternatif untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Probolinggo yaitu dilihat dari Matrik Grand Strategi menunjukkan bahwa strategi peningkatan PAD Kabupaten Probolinggo berada pada kuadran III. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo menghadapi peluang yang sangat besar dalam meningkatkan PAD, namun dilain pihak, mereka juga menghadapi berbagai kendala atau kelemahan *internal*. Olehsebab itu melihat kondisi yang seperti itu, prioritas strategi yang tepat untuk diterapkan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo yaitu adalah strategi W-O.

Beberapa langkah-langkah prioritas strategi atau cara untuk meminimalkan atau mengatasi masalah-masalah internal yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Adapun strategi yang dapat digunakan diantaranya yaitu:

1. Mengoptimalkan kekayaan dan keanekaragaman SDA yang ada menjadi sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini dapat digunakan sesuai kehendak dan kebutuhan pemerintah untuk pembiayaan serta kepentingan daerah demi kepentingan bersama (Rukmana, 2013:2). Kabupaten Probolinggo sendiri SDA yang tersedia disana jumlahnya cukup memadai dan beraneka ragam jenisnya. Akan tetapi terdapat kendala yaitu masih kurang mampunya pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengelolanya agar menjadi sesuatu yang menghasilkan.

2. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan memilih yang berkualitas dan jujur guna meningkatkan kinerja. Kinerja maksudnya disini adalah kinerja dari pegawai pemerintahannya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sebagai contoh pegawai pajak, dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan PAD dan di Kabupaten Probolinggo sendiri berdasarkan sumber data dari BPS pada tahun 2012 pajak daerahnya masih tergolong rendah. Diharapkan setelah itu, dari pihak masyarakat sendiri akhirnya dengan semakin baiknya sistem pelayanannya kesadaran masyarakat menjadi lebih baik dan tidak merasa terpaksa untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hasil dari penerimaan pajak daerah dari seluruh masyarakat nantinya akan masuk dalam kas penerimaan daerah. Selain itu juga, pemilihan tenaga kerja yang jujur untuk menghindari kebocoran-kebocoran tentang penerimaan daerah khususnya PAD.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kinerja keuangan daerah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu tahun 2001-2012 dan menganalisis strategi peningkatan PAD di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dengan menggunakan 4 metode menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan rasio kemandiriannya, rata-rata rasio sebesar 26,56% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah sudah baik, dimana pola kemandirian daerahnya berada pada pola kemandirian yang konsultif. Hasil dari perhitungan rasio desentralisasi fiskal, rata-rata rasio sebesar 5,46% yang menunjukkan bahwa kemampuan kinerja keuangan daerah masih sangat kurang. Hasil dari perhitungan rasio efektifitas, rata-rata rasio sebesar 114,92% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berjalan efektif. Hasil perhitungan rasio belanja pembangunan terhadap APBD menunjukkan bahwa selama kurun waktu 12 tahun kinerja keuangan mengalami penurunan karena terlalu banyaknya pengeluaran untuk belanja, belanja terbanyak digunakan untuk belanja pembangunan.

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT prioritas strategi yang tepat digunakan dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Probolinggo adalah strategi adalah strategi memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada (WO) karena kondisi PAD Kabupaten Probolinggo berada pada kuadran III. Adapun strategi yang dapat digunakan diantaranya yaitu: mengoptimalkan

kekayaan dan keanekaragaman SDA yang ada menjadi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga menjadi daerah yang mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan dana pembangunan daerahnya dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan memilih yang berkualitas dan jujur guna meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya melihat kinerja keuangan daerah dari sisi rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio belanja terhadap APBD. Diharapkan nantinya dipertimbangkan untuk melihat kinerja keuangan suatu daerah dari sisi rasio efisiensi dan modal kerja, agar dapat diketahui lebih detail seberapa besar kinerja keuangan daerah. Selain itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama hendaknya menggunakan jumlah variabel yang lebih beragam dan objek yang berbeda sehingga hasil berikutnya lebih bervariasi dan lebih bermanfaat sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan yang baru.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Edy Santoso, SE, M.Sc yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan, kritik dan saran, serta yang selalu membirakan inspirasi, dorongan, dan motivasi kepada penulis selama ini.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Destrika, Elka. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD dan Komponen PAD Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan. [29 September 2013]
- Ginandjar. 2012. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Artikel Pembangunan untuk Rakyat. UNPAS.
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Center For Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM: Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy. 1998. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal. Universitas Maritim Raja Aki Haji Tanjungpinang. [11 November 2013]
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Selatan*. Jurnal Ilmiah Forum Bisnis dan Kewirausahaan STIE MDP Vol. 2 No.1. [24 November 2013]